

## SIGNIFIKANSI HUKUM BISNIS TERHADAP PRAKTIK ETIKA DAN KEPATUHAN PRAKTIK BISNIS YANG DILAKUKAN DI INDONESIA

Alfieana Sylvie Aulia, Azzahra Wahyu Anjani, Rizal Bachtiar, Aris Prio Agus Santoso

Manajemen, Fakultas Hukum Dan Bisnis Universitas Duta Bangsa

Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135  
(0271)7470550

### Abstrak

Dalam menjalankan bisnis, tentu kita tetap berada dibawah peraturan - peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan begitu kita tidak bisa seenaknya membuat peraturan bisnis yang akan dikelola. Semakin berkembangnya teknologi yang tidak bisa diragukan lagi, beberapa jenis usaha sekarang tumbuh dengan cepat terutama di sentra telekomunikasi, waralaba dan pembiayaan. Dengan adanya hukum bisnis dapat memonitoring lingkungan komersial, yang dapat menghindari dari kerugian, pencegahan, maupun tindakan monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi hukum bisnis terhadap praktek etika dan kepatuhan praktik bisnis yang dilakukan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *library research*, yaitu dengan cara data yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui peraturan yang jelas dan penegakan yang konsisten, hukum bisnis dapat menciptakan lingkungan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam aktivitas bisnis Penegakan hukum. Namun penegakan hukum komersial di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman terhadap peraturan, dan budaya perusahaan yang tidak mendukung etika.

**Kata Kunci:** hukum bisnis, monopoli, peraturan bisnis, etika bisnis

### Abstract

*In running a business, of course we remain under the regulations that apply in Indonesia, that way we cannot arbitrarily make business rules that will be managed. The development of technology cannot be doubted, several types of businesses are now growing rapidly, especially in telecommunications, franchising and financing centers. The existence of business law can monitor the commercial environment, which can avoid losses, prevention, and monopolistic actions. This study aims to analyze the significance of business law on ethical practices and compliance of business practices carried out in Indonesia. The method used is library research, by means of data collected from various sources of literature relevant to the research topic. The results of this study indicate that through clear regulations and consistent enforcement, business law can create an environment that encourages transparency, accountability, and fairness in business activities. However, commercial law enforcement in Indonesia faces a number of challenges, including weak law enforcement, lack of understanding of regulations, and a corporate culture that does not support ethics.*

**Keywords:** business law, monopoly, business regulation, business ethics

### A. Pendahuluan

Penegakan hukum bisnis menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mendukung praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Dalam perkembangan dunia yang semakin maju ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan ekonomi yang berkembang pesat, perlu memahami pentingnya peran hukum bisnis. Pada hakekatnya kita hidup dikelilingi sederet peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, tidak terkecuali dalam berbisnis kita juga masih tidak lepas dengan peraturan hukum yang berlaku untuk menjadi pedoman saat melakukan berhubungan dengan bisnis. Meski telah ada undang-

undang dan regulasi yang mengatur hukum bisnis dan etika bisnis, dalam prakteknya tetap saja ada kendala atau tantangan yang belum efektif.

Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang rutin bagi masyarakat guna merubah perputaran ekonomi mereka. Berbisnis mempunyai tujuan pokok yaitu menghasilkan uang, salah satu kebutuhan manusia. Kata bisnis bersalah dari bahasa Inggris yaitu *Business* yang artinya kegiatan usaha.

Hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakkannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan mendapatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Adanya hukum bisnis bisa menjadikan kegiatan perdagangan terarah dan teratur sesuai mekanisme untuk menjalankan bisnis secara tenang untuk mendapatkan tujuan demi mendapatkan keuntungan. Penelitian ini dapat membantu pembaca untuk memahami hukum bisnis berpengaruh pada etika bisnis dan bisa membetulkan pandangan yang baru untuk tidak ada lagi pelanggaran praktik bisnis serta dapat melanggar hukum bisnis di Indonesia.

Dalam prakteknya, hukum bisnis memiliki berbagai fungsi yang sangat berguna bagi pelaku bisnis seperti informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, dan terwujudnya perilaku bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis. Tetapi masih ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan peraturan bisnis yang sehat atau bisa dikatakan dengan kata lain etika bisnis yang berlainan. Kesenjangan yang nyata antara regulasi hukum bisnis dan praktik di lapangan menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya hukum bisnis untuk mendukung etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu aspek yang terkait dengan tindakan moral dalam kegiatan bisnis. Salah satu cara agar tidak terjadinya pelanggaran etika bisnis yaitu memberlakukan bisnis melalui hukum bisnis. Namun demikian, meskipun hukum bisnis dan etika bisnis telah menjadi perhatian di banyak penelitian, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji integrasi antara hukum bisnis dan etika bisnis dalam konteks perkembangan ekonomi Indonesia.

Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana hukum bisnis di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya atau tidak. Penelitian ini juga akan memberi wawasan tentang peran hukum bisnis, tantangan yang terjadi dalam bisnis dalam menjalankan hukum bisnis, dan memberikan strategi maupun saran untuk memperbaiki praktik bisnis yang tidak sesuai etika bisnis dan hukum bisnis di Indonesia.

Penegakan hukum bisnis di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kompleksitas dunia usaha yang berkembang pesat. Regulasi hukum bisnis memiliki potensi besar untuk menjadi landasan utama dalam menciptakan praktik bisnis yang etis, adil, dan berkelanjutan. Namun, meskipun hukum bisnis dan etika bisnis telah diatur secara komprehensif, masih terdapat kesenjangan nyata antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya mematuhi kaidah hukum dan etika dalam menjalankan bisnis. Upaya mengintegrasikan aspek hukum bisnis dan etika bisnis, yang sering kali hanya dibahas secara terpisah dalam berbagai studi. Selain itu, kajian ini juga berfokus pada konteks khusus perkembangan ekonomi Indonesia, yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan negara lain. Ketidak efektifan penegakan hukum dan masih maraknya pelanggaran etika bisnis, penelitian ini bertujuan memberikan strategi serta solusi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum dan etika bisnis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ekosistem bisnis di Indonesia yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keadilan.

## **B. Metodologi**

Metode yang digunakan dalam ini adalah metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dan informasi melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen penelitian lainnya yang relevan dengan topik penelitian, serta melakukan studi kasus. Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisa dan disusun untuk menjadi laporan penelitian yang bertujuan mengidentifikasi peran, tantangan, dan solusi dalam penerapan etika bisnis.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Peran Hukum Bisnis dalam Mendorong Etika Bisnis

Peranan penting hukum bisnis di Indonesia adalah untuk mendorong etika bisnis yang baik. Salah satu contohnya ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memberikan dukungan bagi penerapan Good Corporate Governance (GCG). Konsep GCG ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam tata kelola perusahaan. UUPT memuat beberapa aturan yang sesuai untuk mendorong perilaku etis, seperti:

1. Pencegahan timbulnya konflik kepentingan: Pasal-pasal dalam UUPT menetapkan bahwa direktur harus bertindak berdasarkan kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok mereka.
2. Penyampaian laporan keuangan yang transparan: Penyusunan laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor bertujuan untuk memastikan akurasi dan kejujuran informasi keuangan.
3. Kepatuhan terhadap undang-undang: Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengharuskan perusahaan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk yang berhubungan dengan hak lingkungan, ketenagakerjaan, serta konsumen.

Apabila dilaksanakan dengan benar, peraturan bisnis dapat:

1. Mencegah terjadinya konflik kepentingan: Memastikan transparansi dalam mengambil keputusan perusahaan dan menghindari transaksi yang tidak jelas.
2. Mengurangi tindakan penipuan keuangan: Persyaratan pelaporan yang ketat membantu mencegah adanya pemalsuan laporan keuangan dan manipulasi data.
3. Pembatasan Monopoli: Hukum bisnis bekerja sama dengan UU Antimonopoli untuk meningkatkan persaingan yang sehat sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Namun, keefektifan hukum bisnis untuk memajukan etika bisnis sangat berpengaruh pada:

1. Penegakan pada penegakan hukum: Tindakan tegas harus diambil untuk menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap etika tidak dapat diabaikan.
2. Kepatuhan perusahaan: Perusahaan memahami pentingnya hal ini dan bersedia memasukkan etika sebagai elemen krusial dalam strategi bisnis mereka.

Contohnya, penggunaan GCG di perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia telah menaikkan keyakinan investor dan mendorong standar etika yang lebih tinggi. Namun, di ranah industri UMKM, pelaksanaan etika bisnis sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum, kurangnya sumber daya, dan kurangnya pengawasan.

Dengan menguatkan peraturan perusahaan serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika bisnis, Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berdaya saing tinggi dan beradab.

### 2. Tantangan dalam Implementasi Hukum Bisnis

Walaupun hukum bisnis di Indonesia dibuat untuk memperkuat etika dalam lingkup bisnis, namun penerapannya seringkali mengalami beberapa halangan. Di bawah ini beberapa tantangan utama yang menghalangi kemampuan hukum bisnis untuk menciptakan lingkungan bisnis yang etis:

#### 1. Lemahnya Penegakan Hukum

Ketidak konsistenan dan kelemahan dalam penegakan hukum menjadi salah satu tantangan utama dalam menerapkan hukum bisnis di Indonesia. Banyak insiden yang melanggar aturan perusahaan, seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran terhadap hak-hak karyawan yang seringkali tidak diambil tindakan secara tegas.

---

Penyebab Lemahnya Penegakan Hukum:

- a) Lembaga hukum kurang mampu dalam memproses perkara dengan cepat dan efisien.
- b) Praktik korupsi di berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi penghalang tercapainya keadilan.
- c) Kekurangan keberanian untuk bertindak terhadap perusahaan besar yang memiliki pengaruh politik.

Dampak Lemahnya Penegakan Hukum:

- a) Orang-orang yang terlibat dalam pelaku usaha tanpa etika merasa tidak bisa dihukum, sehingga perilaku yang tidak pantas terus berlanjut.
- b) Terjadi penurunan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem hukum Indonesia.

## 2. Kurangnya Pemahaman Mengenai Hukum di Kalangan Para Pelaku Usaha

Pelaku usaha terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sering tidak menyadari mengenai kewajiban hukum mereka, baik itu berkaitan dengan hak konsumen, kesehatan serta keselamatan kerja, atau kepatuhan terhadap lingkungan. Penyebab Kurangnya Pemahaman Mengenai Hukum di Kalangan Para Pelaku Usaha:

- a) Kurangnya sosialisasi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b) Keterbatasan tingkat pendidikan dan akses informasi di kalangan pelaku UMKM.
- c) Kesulitan untuk memahami peraturan yang rumit bagi usaha kecil.

Dampak Kurangnya pemahaman mengenai hukum di kalangan para pelaku usaha:

- a) Banyak UMKM yang tidak menyadari ketika melakukan pelanggaran etika atau hukum karena kurangnya pengetahuan tentang hukum.
- b) UMKM telah kehilangan peluang untuk meningkatkan kredibilitas bisnis mereka dengan mematuhi hukum dan etika.

## 3. Budaya Bisnis yang Kurang Mendukung Etika

Banyak perusahaan di Indonesia yang sering kali menganggap etika sebagai formalitas belaka dan bukan sebagai aspek penting dalam strategi bisnis.

Penyebab Budaya bisnis yang kurang mendukung etika:

- a) Budaya yang terlalu menekan pada perolehan keuntungan jangka pendek tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang.
- b) Penghargaan terhadap etika bisnis cenderung rendah di masyarakat.
- c) Pengendalian internal pada perusahaan terhadap pelanggaran etika kurang kuat.

Dampak Budaya Bisnis yang Kurang Mendukung Etika:

- a) Tindakan seperti suap, pengelakan pajak, serta penyalahgunaan sumber daya manusia menjurus ke arah yang lazim.
- b) Reputasi bisnis bisa terpapar risiko dalam situasi krisis, terutama di zaman informasi yang mudah tersebar.

## 3. Studi Kasus Pelanggaran Etika Bisnis

Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum dapat membuka celah bagi pelanggaran etika di lingkungan bisnis. Berikut salah satu contoh nyata yang menggambarkan dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian:

Meski pertambangan di Indonesia merupakan penyumbang besar perekonomian nasional, namun pertambangan sering menjadi sorotan karena dampaknya terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan sering terjadi di berbagai daerah, seperti rusaknya ekosistem di Kalimantan dan Sulawesi melalui pembuangan limbah beracun ke sungai, tanah, dan laut. Kegiatan-kegiatan ini menghancurkan keanekaragaman hayati, merugikan masyarakat lokal dan melanggar

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pelanggaran etika dan hukum Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perusahaan pertambangan sering kali disertai dengan pelanggaran terhadap peraturan yang ada dan pengabaian tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap UU No.32 Tahun 2009: Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, termasuk pengendalian limbah tambang. Banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ini, baik karena kelalaian maupun kesengajaan.
2. Pengabaian tanggung jawab sosial: Perusahaan seringkali tidak memenuhi kewajibannya untuk membersihkan lingkungan yang rusak, misalnya, dalam reklamasi bekas tambang atau dalam mengatasi dampak negatif terhadap ekosistem lokal.
3. Kurangnya pelaporan yang transparan: Banyak perusahaan pertambangan tidak memberikan laporan publik mengenai pengelolaan lingkungan hidup mereka, sehingga melanggar prinsip transparansi yang diwajibkan secara hukum.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan akibat industri pertambangan adalah:

1. Peraturan yang lemah dan kurangnya pemantauan: Kebijakan yang longgar mengenai izin pertambangan dan kurangnya pemantauan di lapangan membuat perusahaan mengabaikan isu lingkungan.
2. Kolusi antara perusahaan dan pejabat pemerintah: Dalam banyak kasus, perusahaan pertambangan berkolusi dengan pejabat setempat untuk menghindari sanksi hukum atau mendapatkan izin untuk beroperasi di kawasan yang dilindungi.

Dampak dari Industri Pertambangan:

1. Kerusakan lingkungan permanen: Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran air yang sulit dipulihkan. Ekosistem yang rusak memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih dan dalam beberapa kasus tidak dapat diperbaiki.
2. Kerugian bagi masyarakat lokal: Hilangnya akses terhadap sumber daya alam seperti air bersih dan lahan subur berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Masyarakat di sekitar tambang sering kali terpapar limbah berbahaya, sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti penyakit kulit, pernapasan, dan kanker.
3. Menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah: Kegagalan mengambil tindakan terhadap pelanggaran lingkungan hidup menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai regulator utama.

Tindakan Perbaikan Untuk mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peraturan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, dan tanggung jawab sosial yang nyata dari pihak perusahaan pertambangan:

1. Pengetatan peraturan: Merevisi pedoman perizinan pertambangan untuk memasukkan persyaratan wajib bagi penilaian dampak lingkungan yang independen. Mewajibkan laporan pengelolaan lingkungan secara berkala dengan audit pihak ketiga.
2. Pemantauan dan Penegakan Hukum: Memperkuat kapasitas pemantauan di lapangan, khususnya di wilayah pertambangan yang rawan pelanggaran. Memberikan sanksi yang tegas, termasuk pencabutan izin dan denda yang besar, kepada perusahaan yang melanggar peraturan.
3. Melibatkan komunitas lokal: Melibatkan masyarakat lokal dalam pemantauan tambang dan pembersihan lingkungan. Memberikan kompensasi dan solusi nyata kepada masyarakat terdampak seperti, pembangunan infrastruktur air bersih dan pelayanan kesehatan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif pertumbuhan dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan.

#### 4. Strategi untuk Memperkuat Hukum Bisnis dalam Etika Bisnis

Menciptakan lingkungan bisnis yang lebih beretika di Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Berikut adalah tiga strategi utama untuk memperkuat hubungan antara hukum dan etika bisnis:

##### 1. Pelatihan Hukum bagi Perusahaan

Meningkatkan pemahaman hukum perusahaan, khususnya UMKM, merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan dan praktik etika. Langkah-langkah yang dapat dilakukan :

- a) Pelatihan dan Workshop: Pemerintah, asosiasi bisnis dan lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan pelatihan rutin mengenai hukum dan etika bisnis.
- b) Digitalisasi informasi hukum: Menciptakan platform digital dimana peraturan perusahaan disajikan dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah diakses oleh perusahaan.
- c) Konsultasi Gratis atau Terjangkau: Memberikan layanan konsultasi hukum kepada UMKM untuk membantu mereka memahami dan mematuhi kewajiban hukum.

Dampak yang diharapkan:

- a) Perusahaan lebih sadar akan tanggung jawab hukum dan etika mereka.
- b) Mengurangi angka pelanggaran hukum karena ketidaktahuan akan peraturan.

##### 2. Penegakan Hukum yang Konsisten

Penegakan hukum yang konsisten menjadi dasar untuk menciptakan efek jera dan mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis secara beretika.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- a) Reformasi Sistem Hukum: Mengurangi praktik korupsi di lembaga hukum melalui transparansi prosedur hukum dan akuntabilitas pejabat.
- b) Penguatan penegakan hukum: Penguatan kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan profesional dan penyediaan sumber daya yang memadai.
- c) Penerapan sanksi yang tegas: Sanksi yang sesuai untuk pelanggaran hukum perusahaan, termasuk pencabutan izin perusahaan atau denda yang besar.

Dampak yang diharapkan:

- a) Mengirimkan sinyal kuat bahwa pelanggaran hukum dan etika tidak akan ditoleransi.
- b) Memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap keadilan hukum di Indonesia.

##### 3. Menghargai Praktik Bisnis yang Etis

Memberikan penghargaan kepada perusahaan secara konsisten mematuhi etika bisnis merupakan cara efektif untuk memotivasi kepatuhan dan mendorong budaya etis dalam dunia bisnis.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan :

- a) Penghargaan Nasional untuk Praktik Bisnis yang Etis: Pemerintah dapat memulai penghargaan tahunan bagi perusahaan yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam praktik bisnis mereka.

- 
- b) Insentif perpajakan dan peraturan: Menciptakan insentif seperti, Keringanan pajak bagi perusahaan yang terbukti menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
  - c) Kampanye Kesadaran Masyarakat: Mendidik masyarakat tentang pentingnya mendukung perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis.

Dampak yang diharapkan:

- a) Meningkatkan motivasi perusahaan untuk persaingan yang sehat dan beretika.
- b) Memperkuat reputasi Indonesia sebagai lingkungan bisnis yang transparan dan bertanggung jawab.

Dengan menerapkan strategi tersebut secara terpadu, maka hukum dan etika bisnis di Indonesia dapat saling mendukung sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Hukum bisnis berperan penting dalam mendukung praktik bisnis yang beretika di Indonesia Melalui peraturan yang jelas dan penegakan yang konsisten, hukum bisnis dapat menciptakan lingkungan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam aktivitas bisnis Penegakan hukum seperti tata kelola perusahaan yang baik (GCG), pengawasan monopoli, dan kewajiban pelaporan keuangan dapat membantu memastikan bahwa operasi bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika.

Namun penegakan hukum komersial di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman terhadap peraturan, dan budaya perusahaan yang tidak mendukung etika.

Hal ini menyebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, mulai dari pemalsuan laporan keuangan hingga pencemaran lingkungan.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan inisiatif strategis seperti:

1. Pelatihan dan dukungan hukum bagi pelaku ekonomi khususnya usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis
2. Penegakan hukum yang konsisten, termasuk pembenahan sistem hukum dan penguatan kekuatan penegakan hukum agar memberikan efek jera.
3. Penghargaan dan insentif bagi perusahaan yang berperilaku etis untuk mendorong budaya perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab

Langkah-langkah ini akan memungkinkan Indonesia menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif, adil dan bermartabat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem perekonomian nasional.

---

**E. Daftar Pustaka**

- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hidayat, S., & Mardiyah, A. "Analisis Kasus Jiwasraya: Dampak Manipulasi Keuangan terhadap Etika Bisnis di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(2), 101–115, 2020.
- Idayanti, Soesi. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- Johanes, A. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Lazuardini, RR Amanna, Dzikrillah LAH, & Rustandi. "Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis di Indonesia." *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 19(2), 2023.
- Puspitasari, D., & Arifin, Z. "Peran Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 6(3), 142–155, 2018.
- Raharjo, H. "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mengatasi Pencemaran oleh Industri." *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 12(4), 311–330, 2017.
- Rasyidi, Mudemar A. "Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 9(1), 2018.
- Sukardi, A. "Implementasi Etika Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan pada Perusahaan Tambang di Indonesia." *Jurnal Etika dan Bisnis*, 7(1), 23–35, 2015.